# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Menurut Dini dan Novita (dalam Seminar Nasional, 2013) kemampuan keuangan setiap daerah tidak sama dalam mendanai berbagai macam kegiatannya. Hal tersebut menimbulkan adanya kesenjangan fiskal antar satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi kesenjangan fiskal ini, pemerintah mengalokasikan dana transfer yang bersumber dari dana APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dana perimbangan dari pemerintah yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah (UU 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya. Namun pada praktiknya, transfer dana yang bersumber dari APBN merupakan sumber pendanaan utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari.

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam (2014: 142) dalam upaya PEMDA membangun daerah dan meningkatkan pelayanan publik, PEMDA dapat menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan. Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, PAD berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang menjadi sumber PAD. Dalam mengukur keberhasilan pengembangan otonomi di daerah, kita dapat melihat dari derajat otonomi fiskal yang berada di daerah tersebut yaitu dengan cara membandingkan antara PAD dengan total penerimaan APBD yang diterima setiap tahunnya. Apabila PAD dari suatu daerah mampu memberikan kontribusi terbesar dalam pemasukan susunan belanja daerah, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut tergolong sebagai daerah yang cukup maju dan bagus dari sektor ekonomi, dan begitu pula sebaliknya. Dan hal ini diharapkan pada masa yang akan datang, ketergantungan daerah terhadap transfer dana pusat hendaknya diminimalisasi guna menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Akan tetapi, setiap daerah memiliki kemandirian daerah dan kemampuan keuangan yang tidak sama satu sama lainnya. Di satu pihak beberapa daerah tergolong sebagai daerah yang beruntung karena memiliki sumber-sumber penerimaan yang potensial. Di lain pihak, banyak daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang jauh dari memadai, yang mengakibatkan daerah-daerah semacam ini mengalami kesulitan dalam pembiayaan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerahnya, sehingga dapat menimbulkan ketimpangan fiskal.

Dalam mengatasi ketimpangan fiskal tersebut, pemerintah memberikan dana perimbangan. Dana tersebut bersumber dari APBN yang meliputi dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pada pemerintah daerah. DAU dimaksudkan untuk dapat memperbaiki pemerataan perimbangan keuangan yang ditimbulkan oleh bagi hasil sumber daya alam tersebut. Dana Alokasi Umum (DAU) sendiri ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN (Mentayani dan Rusmanto, 2013). Perhitungan perolehan DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal *(fiscal gap)* suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah *(fiscal need)* dan potensi daerah *(fiscal capacity).* Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar.

Selain DAU, Pemerintah daerah juga akan mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung tersedianya dana dalam APBN (Situngkir dan Manurung, 2009). Pada dasarnya DAK dialokasikan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan (pelayanan dasar dan pelayanan rujukan), jalan, irigasi, air minum, sanitasi, prasarana pemerintah, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, sarana dan prasarana pedesaan, serta perdagangan. Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan Pasal 61 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping untuk mendanai kegiatan fisik sekurang-kurangnya 10% dari nilai DAK yang diterimanya. Dana Pendamping tersebut wajib dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran yang berjalan. DAK tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya pelatihan, biaya perjalanan pegawai daerah, dan lain-lain biaya umum sejenis. Biaya untuk keperluan di atas dapat dibebankan pada APBD di luar dana pendamping.

Adapun fenomena-fenomena yang terjadi saat ini misalnya nilai anggaran dalam APBD Kota Cirebon selalu mengalami peningkatan. Namun, sisa anggaran dalam silpa justru mengalami peningkatan tajam. Tahun 2012 tercatat silpa mencapai Rp. 35 miliar. Tahun 2013 naik hingga Rp. 114 miliar. Hal ini menunjukan banyak kegiatan yang tidak berjalan sehingga anggaran tidak terserap. Anggota Komisi A DPRD Kota Cirebon Cecep Suhardiman SH MH mengatakan secara jumlah APBD Kota Cirebon selalu mengalami peningkatan. Hal ini tidak diimbangi dengan pelaksanaan program kegiatan di SKPD-SKPD yang ada. “Banyak program tidak berjalan. Ini jelas mengganggu pelayanan publik,” ucapnya Radar, Senin (2/6). Dengan tidak berjalannya kegiatan yang terprogram, anggaran tidak terserap dan silpa mencapai Rp. 114 miliar di tahun lalu. Jumlah ini menjadi rekor dalam sejarah Cecep menjadi wakil rakyat. Pada sisi lain, peningkatan tajam sisa anggaran menunjukan lemahnya pelaksanaan program dan kegiatan di SKPD. Bahkan, dia sering melihat banyak kegiatan yang terlambat dikerjakan dan hasilnya tidak maksimal. Jika sudah demikian, celah hukum menjadi lebih terbuka. “Jangan takut menggunakan anggaran besar. Kalau pengawasan ketat dan sesuai rencana, tidak akan ada masalah,” ujarnya meyakinkan.

Hal itu dibuktikan dengan pembangunan gedung Bappeda baru. Dengan anggaran besar, tidak ada persoalan karena dikerjakan sesuai ketentuan. Cecep mengimbau, kegiatan yang bersifat mendukung peningkatan pelayanan harus dilaksanakan. Seperti gedung BPMPPT yang saat ini sudah tidak layak untuk menjadi tempat pelayanan publik. “Hanya diajukan perehaban Rp. 300 juta. Harusnya dibangun seperti kantor Bappeda baru itu,” terangnya. Agar program kegiatan terlaksana dengan baik, diperlukan kesiapan aparatur SKPD pelaksana yang mumpuni. Cecep menilai, selama ini SDM belum maksimal dan merata.
Kerugian yang ditimbulkan akibat silpa yang membengkak, pelayanan dan pelaksanaan visi misi Ano-Azis menjadi terganggu. Karena tidak terserap, lanjut Cecep, silpa Rp. 114 miliar dimasukan kedalam APBD Perubahan 2014.

Berbicara anggaran APBD Perubahan 2014, jumlahnya bertambah menjadi Rp. 172,9 miliar. Penambahan berasal dari kegiatan yang sudah direncanakan dan optimalisasi penerimaan. “Semakin kecil silpa, artinya kegiatan semakin efektif. Begitupula sebaliknya,” simpul Cecep. Terpisah, Sekda Drs Asep Dedi MSi mengatakan saat ini sudah terbentuk Tim Evaluasi Percepatan Anggaran (TEPA) yang dipimpin Kepala Bappeda Ir Budi Raharjo MBA. Meskipun sudah dibentuk tahun lalu, tim baru efektif tahun ini. Tim tersebut, lanjutnya, bertugas untuk melakukan pemantauan dan laporan berkala terkait berbagai program. Hasil akhirnya agar kegiatan berjalan tanpa silpa yang besar. Terkait itu, diakuinya silpa tahun 2013 yang mencapai Rp. 114 miliar merupakan angka besar. “Normalnya silpa Rp. 10 miliar maksimal Rp. 20 miliar. Silpa tinggi karena berbagai macam faktor, salah satunya takut berurusan dengan hukum, ”terangnya. Tahun 2013 lalu, banyak proyek gagal lelang. Tidak hanya itu, banyak pula proyek yang hanya memiliki waktu sempit karena gagal lelang tersebut. *Sumber :* [*http : // www . radar cirebon . com / silpa – 2013 – mencapai rp 11 miliar . html*](http://www.radarcirebon.com/silpa-2013-mencapai-rp11%20miliar.html)

Belum lama ini Kabupaten Bekasi mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam laporan keuangan daerah 2015 tingkat Provinsi Jawa Barat. Namun sayangnya predikat tersebut menjadi pertanyaan bagi sebagian kalangan. “Indikasinya sangat jelas, pada tahun 2014 saja dari anggaran APBD Rp.4,491,935,457,689 yang tidak terserap mencapai Rp.836,982,234,066 dan dimasukan ke dalam sisa lebih anggaran (silpa) sedangkan realisasi penyerapan sebesar Rp.3,761,215,638,532,” ungkap Sekertaris LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) Ergat Bustomi.

Dengan Silpa yang sangat besar, kata Ergat, kenapa Kabupaten Bekasi bisa menyabet WTP. “Apakah pertimbangan BPKP karena silpa besar yang menjadikan Bekasi bisa mendapat WTP, ”lanjutnya. Hal senada dikatakan Sekertaris Peduli Lingkungan Jawa Barat (Pelija), AA Mangun Jaya, predikat tersebut jangan sampai menyesatkan masyarakat. Apalagi ditambah dengan spanduk ucapan kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin terpampang dimana-mana. “Jangan-jangan predikat ini hanya digunakan sebagai ajang pencitraan semata yang akhirnya tidak berdampak apapun bagi perbaikan kualitas kehidupan masyarakat di Bekasi sendiri, ”ujarnya.

Pihaknya, lanjut AA,  akan mencari perbandingan di wilayah lain, terkait perolehan WTP tersebut.  Termasuk akan mencari data yang valid dari BPKP Provinsi Jawa Barat. “Kita akan berkomunikasi dengan BPKP untuk menanyakan kriteria dan persyaratan bagi kabupaten atau kota supaya bisa meraih WTP. Termasuk hal apa saja yang dinilai oleh BPKP,” tandasnya. (tle) *Sumber:* [*http : // www .jabar publisher . com / indx . php / 2015 / 06 / 11 / silpa – tinggi – predikat -wtp-bekasi-diragukan/*](http://www.jabarpublisher.com/indx.php/2015/06/11/silpa-tinggi-predikat-wtp-bekasi-diragukan/)

DPRD Kabupaten Bogor mempertanyakan kinerja Bupati Bogor Nurhayanti. Pasalnya, dalam dua tahun berturut-turut sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) terus menembus Rp. 1,1 triliun. Kondisi tersebut cukup kontras dengan masih banyak sarana prasarana dan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya terkait infrastruktur jalan di Kabupaten Bogor yang rusak. Sehingga kondisi tersebut dinilai kalangan legislatif, di bawah kepemimpinan Nurhayanti Pemkab Bogor gagal dalam menjalankan amanah rakyat, tepatnya dalam melaksanakan sejumlah program pembangunan. “Masak dalam dua tahun berturut terus menyisakan anggaran Rp. 1,1 triliun. Bahkan pada 2015 ini lebih tinggi yakni Rp. 1,132 triliun. Sedangkan pada 2014 Rp. 1,101 triliun. Ini menjadi bukti Pemkab Bogor era kepemimpinan Nurhayanti gagal,” ungkap Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Edwin Sumarga, Kamis, 14 April 2016 kemarin. Menurut Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bogor itu, tingginya besaran Silpa harus menjadi bahan evaluasi bagi DPRD, sekaligus menilai kinerja Bupati Bogor selama dua tahun. “Pada tahun 2014 lalu, kami bisa memaklumi, karena pada saat itu adanya beberapa kendala, seperti aturan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat yang berubah-ubah, tapi untuk 2015 tidak dapat ditolelir lagi,” tegasnya.

Edwin melanjutkan, dengan terus menerus tingginya angka SILPA ini jelas merugikan rakyat, dalam pemenuhan hak-haknya selaku pemilik uang. “Rakyat berhak menggugat Pemkab Bogor. Bahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor, sebagai penegak Perda wajib menindaklanjuti jika ada rakyat yang menggugat, karena sama saja Pemkab Bogor tak bisa menjalankan amanah Perda APBD,” terusnya. Anggota Fraksi PDIP Slamet Mulyadi menilai, Pemkab Bogor selain tak becus mengelola anggaran, khususnya dalam melaksanakan amanah rakyat, juga wajib mengevaluasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “APBD yang kita sahkan itu adalah uang rakyat yang dititipkan kepada Pemkab Bogor, untuk digunakan membiayai program-program pembangunan, tapi kenapa sudah dikasih duit, tak dipakai hingga membuat Silpa membengkak, ini sama artinya para petinggi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bogor mengkhianati amanah rakyat,” jelasnya. Bupati Nurhayanti saat dikonfirmasi mengungkapkan rendahnya penyerapan anggaran yang dibuktikan dengan tingginya Silpa disebabkan beberapa kegiatan di SKPD terlambat dalam melakukan penyerapan. Pasalnya, dari Rp. 6,770 triliun belanja daerah, hanya terserap Rp5,638 triliun, sehingga ada sisa sebesar Rp. 1,132 triliun. “Salah satu belanja yang tak terserap adalah bansos, akibat adanya aturan yang mewajibkan penerima harus memiliki badan hukum serta ada program yang tidak dilaksanakan sehingga anggarannya diluncurkan ke tahun 2016 ini, ”kilahnya.*Sumber:http://metro.sindonews.com/read/1101150/171/silpakabupaten-bogor-capai-rp1-1-triliun-bupati-dianggap-gagal-1460645750*

SOREANG, (PRLM).- Sisa lebih penggunaan anggaran APBD Kabupaten Bandung tahun 2014 mencapai Rp 600 miliar atau setengah triliun rupiah lebih dari total APBD sebanyak Rp 3,7 triliun. Nilai anggaran daerah yang tidak terserap tersebut merupakan yang terbesar setidaknya dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Besarnya silpa tahun lalu tersebut menuai kritik dari kalangan DPRD Kabupaten Bandung. Soalnya, silpa menunjukkan indikasi kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung yang tidak maksimal.

Erwin Gunawan, anggota Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung tahun 2014 menuturkan, silpa tersebut berasal dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Dinas Kabupaten Bandung, di antaranya Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan. “Silpa kebanyakan berasal dari anggaran belanja langsung. Namun, serapan belanja tidak langsung juga cukup banyak, diantaranya serapan di DPPK hanya sekitar 40 persen,” ujar Erwin, Kamis (7/5/2015).

Untuk belanja tidak langsung, lanjut Erwin, Silpa diantaranya berasal dari berbagai program kerja SKPD. Dinas Pendidikan misalnya, ada anggaran beasiswa untuk 3.000 siswa tidak mampu sebanyak Rp 4 miliar yang tidak terserap. Sejumlah dana pembangunan dan perbaikan ruang kelas baru pun banyak yang tidak terealisasi. Dinas Kesehatan juga berkontribusi terhadap besarnya Silpa Kabupaten Bandung untuk anggaran tahun lalu. Diantaranya untuk biaya operasional sejumlah puskesmas. “Sementara di Dinas Bina Marga, untuk satu proyek pembangunan jalan tembus Kamojang saja, ada anggaran yang tidak terserap sebanyak Rp 19 miliar. Itu belum termasuk dari berbagai proyek lainnya,” tutur Erwin.

Erwin mengungkapkan, besarnya silpa tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung tidak memiliki perencanaan yang matang dalam mengelola anggaran. Akibatnya, banyak dana yang seharusnya dibelanjakan untuk kepentingan publik tidak tersalurkan. Dengan kondisi itu, Erwin meminta agar Pemkab Bandung melakukan evaluasi agar silpa tidak terjadi untuk anggaran tahun ini. Sebab, menurut dia, silpa merupakan ironi ketika anggaran tidak terpakai, sementara masih banyak pelayanan publik yang membutuhkan dana.

Besarnya silpa APBD Kabupaten Bandung tahun 2014 juga dikritisi Ketua Forum Diskusi Anggaran Kabupaten Bandung, Deni Abdullah. Menurut dia, besarnya APBD Kabupaten Bandung tahun lalu, seharusnya mendorong Pemkab Bandung untuk merencanakan penggunaan anggaran secara maksimal bagi pelayanan publik. “Silpa yang besar ini menunjukkan bahwa Pemkab tidak bisa melakukan perencanaan dengan baik, sehingga banyak anggaran yang tidak terserap,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Deni, banyak pelayanan publik yang membutuhkan sokongan dana, di antaranya armada pemadam kebakaran. Untuk melayani bahaya kebakaran di 31 kecamatan, UPTD Pemadam Kebakaran saat ini hanya memiliki 8 armada yang kebanyakan terpusat di Soreang. “Bisa dibayangkan, betapa sulitnya petugas pemadam untuk cepat datang ke lokasi kebakaran, mengingat wilayah Kabupaten Bandung ini sangat luas,” ujarnya.

Besarnya silpa tahun lalu, kata Deni, tak hanya harus menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Bandung. Namun, menurut dia, hal itu juga harus menjadi perhatian bagi kalangan legislatif. DPRD harus lebih selektif dalam menyetujui setiap pengajuan program kerja dari Pemkab Bandung. “DPRD jangan gampang setuju dengan setiap pengajuan program kerja eksekutif. Anggap saja itu sebagai hukuman bagi Pemkab Bandung karena menyisakan silpa yang besar,” ujarnya. (CecepWijaya/A89).Sumber*:*[*http://www.pikiranrakyat.com/bandungraya/2015/05/07/326386/silpa-setengah-triliun-lebihkinerjapemkab-bandung-dinilai-tak*](http://www.pikiranrakyat.com/bandungraya/2015/05/07/326386/silpa-setengah-triliun-lebihkinerjapemkab-bandung-dinilai-tak)

Peneliti sebelumnya seperti Abdullah dan Halim (2003) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa/Bali. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara terpisah DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Secara bersamaan DAU dan PAD juga berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

 Menurut RYB Prakoso dan YB Mudakir (2011) dari penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil pengujian hipotesis pertama diperoleh bahwa ada pengaruh yang positif antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah secara parsial. Hasil pengujian hipotesis kedua diperoleh bahwa ada pengaruh yang positif antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah secara parsial. Dan Hasil pengujian hipotesis ketiga diperoleh bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara PDRB terhadap Pengalokasian Belanja Daerah secara parsial. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah pendapatan asli daerah yang diperoleh kabupaten / kota di Propinsi Jawa Tengah penting untuk ditingkatkan agar kabupaten / kota dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi karena belanja daerah untuk perkembangan wilayah yang diterimanya akan meningkat.

Oleh karena itulah maka peneliti ingin meneliti bagaimana pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2011-2015. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH” (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2011-2015)”

## Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

### Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah yang diajukan adalah adanya potensi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terserap secara baik dan tidak memberikan implikasi yang signifikan bagi belanja daerah

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2011-2015.
2. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2011-2015.
3. Bagaimana Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2011-2015.
4. Seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah (BD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2011-2015.
5. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2011-2015.
6. Seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2011-2015.

## Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2011-2015.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2011-2015.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2011-2015.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2011-2015.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2011-2015.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2011-2015.

## Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu kegunaan secara praktis dan kegunaan secara teoritis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

### Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam memperbanyak pengetahuan yang berhubungan dengan Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011-2015.

### Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan dalam menganalisa laporan keuangan daerah yang berkaitan dengan Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah. Selain itu juga sebagai sarana bagi penulis untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, terutama yang berkaitan dengan judul yang penulis buat.

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam hal perencanaan, pengendalian dan evaluasi dari anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD) dan anggaran penerimaan dan belanja nasional (APBN).

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi para akademisi sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dibidang keuangan khususnya mengenai Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah.

1. Bagi Praktisi

Diperolehnya bukti empiris dalam penelitian ini menyangkut Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah dapat dijadikan masukan bagi profesi yang bersangkutan dengan judul penelitian.

1. Bagi Peneliti Lain

Sebagai bahan referensi sehingga dapat memberikan informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya yang meneliti bahasan yang sama.